

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR KOPERASI

a. Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 ayat 1 ialah "Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan".

Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasi dan makna tujuan usaha yang terkandung. Koperasi menekankan bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan hak para anggotanya sehingga keputusan tertinggi pada koperasi ditentukan oleh semua anggota koperasi.

Menurut Rudianto (2010 : 3) menyatakan bahwa : " secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah badan usaha yang di kelola secara demokratis". Sedangkan Menurut Sudarwanto (2013 : 19) menyatakan bahwa : "Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan suatu badan usaha yang dikelola secara demokratis".

b. Landasan dan asas koperasi

Ada beberapa landasan koperasi di Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia, yaitu :

- 1) Landasan Idiil (Pancasila)
- 2) Landasan Mental (Setia kawan dan kesadaran diri sendiri)
- 3) Landasan Struktural & Gerak (UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1)

Asas asas koperasi yaitu :

- 1) Asas kekeluargaan (artinya setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal hal yang yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut).
- 2) Asas gotong royong (artinya setiap anggota koperasi harus memiliki toleransi, tidak egois atau individualis, serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya).

c. Tujuan koperasi

Tujuan koperasi tercantum dalam UU NO. 25 Tahun 1992 pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Pancasila.

Menurut Rudianto (2010 :4), berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam UU NO. 25 Tahun 1992 pasal 3, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal berikut :

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, mudah dipahami bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk

perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

d. Prinsip koperasi

Menurut Sudarwanto (2013 : 21) prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pemaksaan oleh pihak manapun untuk menjadi anggota koperasi.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan anggota koperasi. Pengaturannya diatur dalam anggaran dasar / rumah tangga koperasi.

3) Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota

Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan partisipasi anggota koperasi dalam membentuk kontribusi sisa hasil usaha selama periode akuntansi. Dengan demikian pendapatan anggota koperasi dari pembagian sisa hasil usaha sangat tergantung dari partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi pembentukan sisa hasil usaha bagi koperasi.

4) Pemberian jasa atas modal

Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal merupakan cermin atas kewajiban pemberian imbalan bagi partisipasi anggota koperasi serta

mendorong makin kuatnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi.

5) Kemandirian

Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha dijalankan dan diawasi oleh anggota harus dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi anggotanya dan masyarakat.

e. Jenis - jenis koperasi

Menurut Muljono (2012:4) Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi. Berdasarkan kegiatan usaha secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota koperasi.
- 2) Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk yang kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi.
- 3) Koperasi Simpan-pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

Menurut Muljono (2012:4) Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota. Berdasarkan latar belakang anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama kebutuhan dibidang pertanian.

- 2) Koperasi Pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.
- 3) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

Menurut Muljono (2012:4) Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya. Berdasarkan kondisi anggotanya, koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Koperasi Primer. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- 2) Koperasi Sekunder. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

f. Modal pokok koperasi

Menurut SAK ETAP modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan serta dapat diambil kembali apabila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi merupakan simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, dan penyisihan hasil usaha termasuk cadangan.

2. PENGERTIAN KINERJA KEUANGAN

a. Pengertian kinerja keuangan

Menurut IAI (2007) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang

dimilikinya. Sedangkan menurut SAK ETAP (2013 :06) menyatakan bahwa "kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi.

Penghasilan dan beban dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Penghasilan (*Income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terikat dengan distribusi kepada penanaman modal.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan di perusahaan.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

Setiap perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Ukuran kinerja keuangan perusahaan menurut bidang dan sudut pandang, yaitu :

- 1) sudut pandang manajemen atau perusahaan
- 2) sudut pandang pemilik
- 3) sudut pandang pemberi pinjaman

Aspek utama dari kinerja keuangan yaitu tercapainya keseimbangan yang baik antara hutang dan ekuitas. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak.

3. GAMBARAN UMUM SAK ETAP

a. Pengertian SAK ETAP

Pada bulan April 2009, Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) secara resmi mengakui 3 (tiga) pilar standar akuntansi keuangan (IAI, 2009). Tiga pilar tersebut adalah :

1. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)
2. SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
3. PSAK- Syari'ah

SAK ETAP nampak sejalan dengan *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-Sized Entities* (IFRS for SMEs). Meskipun memiliki judul yang berbeda, namun baik SAK ETAP maupun IFRS for SMEs sama sama di peruntukkan bagi entitas tanpa

akuntabilitas publik, hanya saja istilah yang digunakan sebagai judul pada IFRS adalah *small and medium-sized entities (SMEs)*. SAK ETAP telah disahkan pada bulan Mei 2009, IFRS for SMEs sendiri baru disahkan pada bulan Juli 2009.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan entitas (Perusahaan) tanpa akuntabilitas publik (ETAP) adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang tetap relevan dan andal. SAK ETAP akan khusus digunakan untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik yang signifikan tanpa harus menggunakan PSAK yang umum.

b. Tujuan penyusunan SAK ETAP

Perusahaan dapat menggunakan SAK ETAP dikarenakan, pertama PSAK - IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan kecil menengah mengingat penentuan *fair value* memerlukan biaya tidak sedikit, kedua PSAK - IFRS rumit dalam implementasinya, ketiga PSAK - IFRS menggunakan *principle based* sehingga membutuhkan banyak *profesional judgement*, keempat PSAK - IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat. Oleh karena itu SAK ETAP digunakan oleh perusahaan kecil menengah sebagai standar akuntansi keuangan perusahaan yang mereka kelola.

c. Kriteria SAK ETAP

Pada intinya, SAK ETAP adalah PSAK yang disederhanakan:

1. Relevan
2. Merupakan pilihan alternatif standar akuntansi yang sederhana
3. Penyederhanaan pengakuan dan pengukuran
4. Mengurangi tingkat pengungkapan dan
5. Penyederhanaan proses penyusunan

Transaksi-transaksi pada SAK ETAP biasanya tidak terlalu kompleks, perlu pula diketahui bahwa karakter SAK ETAP yaitu :

1. Berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK - UMUM
2. Menggunakan *historical cost*
3. Hanya mengatur transaksi umum yang terjadi pada ETAP
4. Lebih sederhana
5. Tidak berubah dalam beberapa tahun kedepan

Adapun kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu :

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,

pialang dan / atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, bank investasi.

- 2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan pengguna SAK ETAP. Akan tetapi, bila suatu entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan menyusun laporan keuangannya sesuai IFRS for SMEs, maka laporan keuangan yang disusun tersebut tidak boleh menyatakan bahwa "laporan keuangan telah disusun sesuai dengan IFRS SMEs", meskipun terdapat undang undang atau regulasi yang mengizinkan penggunaan IFRS for SMEs, bagi entitas yang memiliki akuntabilitas yang signifikan.

Terdapat perbedaan mendasar antara SAK ETAP dan SAK Umum. Salah satunya dapat dilihat dari komponen Laporan Keuangan. SAK ETAP masih menggunakan istilah Neraca, Laporan Laba rugi, Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan Catatan atas Laporan keuangan. Sedangkan SAK Umum, Neraca berganti nama dengan Laporan posisi keuangan, disajikan pula Laporan Laba Rugi Komprehensif dianggap perlu pada SAK Umum, sedangkan tidak pada SAK ETAP.

Perbedaan lainnya pada metode pengukuran. SAK ETAP menggunakan *historical cost* dan nilai wajar. Sedangkan SAK Umum menggunakan *Historical cost*, biaya kini, nilai realisasi bersih dan nilai sekarang. Selain itu, dalam penilaian Aset, SAK ETAP hanya

menggunakan biaya historis dan SAK Umum bisa menggunakan yang relevan dan lebih andal.

Perbedaan inilah yang menjadikan SAK ETAP menjadi lebih sederhana dan aplikatif bagi perusahaan kecil. bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar yang tidak diharuskan memiliki akuntabilitas publik juga diizinkan menggunakannya.

4. STANDAR AKUNTANSI KOPERASI

Awalnya, pedoman dalam standar akuntansi koperasi menggunakan PSAK NO 27. Didalam PSAK NO 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Namun, pada 23 Oktober 2010, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi. Sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PPSAK No. 8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK No 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard atau IFRS*) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang lain.

PPSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip prinsip PSAK No 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Pada jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV (Veronica, & Rudiantoro, 2011) menyebutkan bahwa lahirnya SAK ETAP dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan SAK khusus untuk UKM agar bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memeberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga pengusaha UKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya. Terkait dengan kondisi diatas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 januari 2011 namum penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2010.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI MENURUT SAK ETAP

a. Pengakuan

Laporan keuangan menurut SAK ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAK ETAP mensyaratkan bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan

periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan . SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

b. Pengukuran

SAK ETAP paragraf 2.30-2.31 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar.

c. Penyajian

SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit

dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dalam suatu entitas harus mematuhi persyaratannya dengan menggunakan SAK ETAP.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP pos pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi.

6. LAPORAN KEUANGAN MENURUT SAK ETAP

a. Elemen laporan keuangan menurut SAK ETAP

SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas dari :

1) Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada suatu tanggal tertentu akhir pelaporan dan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha dan piutang lainnya
- c) Persediaan
- d) Properti investasi
- e) Aset tetap

- f) Aset tidak berwujud
- g) Utang usaha dan utang lainnya
- h) Aset tidak berwujud
- i) Kewajiban diestimasi
- j) Ekuitas

SAK ETAP nomor 4 paragraf 4 menyatakan bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, dimana klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aset lancar

SAK ETAP (2009:20) menyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika :

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas
2. Dimiliki untuk diperdagangkan
3. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
4. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir pelaporan.

b. Kewajiban jangka pendek

SAK ETAP (2009:20) menyatakan bahwa entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika :

1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas
2. Dimiliki untuk diperdagangkan
3. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (Ikatan Akuntan Indonesia,2009a:5.2). Laporan laba rugi minimal mencakup pos pos sebagai berikut :

- pendapatan
- beban keuangan

- bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas
- beban pajak
- laba atau rugi netto

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 6.2).

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 : 7.1). Informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas menurut SAK ETAP yang dikutip oleh Ranu Agus (2011), yakni sebagai berikut :

- **Aktivitas operasi**

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini dapat berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari *royalti, fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas

kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi netto dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan. Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan.

- **Aktivitas Pendanaan**

SAK ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan atas penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan dan pembayaran kas terkait penerbitan dan pelunasan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009: 8.1).

Catatan atas laporan keuangan harus:

1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
2. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
3. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

b. Unsur-unsur laporan keuangan menurut SAK ETAP

Menurut SAK ETAP unsur - unsur laporan keuangan terdiri dari :

1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas (SAK ETAP, 2009 :2.12).

Menurut Warren (2005 : 18) aset adalah sumber daya yang di miliki oleh perusahaan, contohnya : kas, tanah, pabrik, dan peralatan,

serta hak atau klaim properti. Sedangkan Kleso bisnis dan digunakan dalam melaksanakan aktivitas produksi, konsumsi, dan jual beli.

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi (SAK ETAP, 2009 : 2.12).

3) Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan mengacu pada beberapa istilah seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti dan sewa (SAK ETAP, 2009, 2.22).

Suwardjono (2005 : 307) menyatakan bahwa pengertian dari pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aset, kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang terus menerus pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban, dan kegiatan yang menyebabkan kenaikan ekuitas.

4) Beban

Beban (expens) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal (SAK ETAP, 2009, 2.20).

Pada SAK ETAP nomor 2 paragraf 23 menyatakan bahwa beban mencakup kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa.

- a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap.
- b) Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin, atau mungkin tidak, timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Ketika kerugian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi.

5) Ekuitas

Ekuitas adalah hak sisa pada suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Ekuitas meliputi investasi pemilik entitas, ditambah dengan hasil atas investasi yang diperoleh melalui operasi yang menguntungkan dan hasil yang ditahan kembali untuk digunakan dalam operasi entitas tersebut, dikurangi dengan penurunan atas investasi pemilik sebagai akibat dari operasi yang tidak menguntungkan dan alokasi kepada pemilik (SAK ETAP, 2009a. 2.19).

7. PERBEDAAN SAK ETAP dan PSAK

Secara rinci, perbedaan PSAK dan SAK ETAP adalah sebagai berikut:

| No | Elemen | PSAK | SAK ETAP |
|----|---|--|---|
| 1. | Penyajian Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Laporan posisi keuangan Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Asset lancar Liabilitas jangka pendek Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Sama dengan PSAK, kecuali informasi yang disajikan dalam neraca, yang menghilangkan pos : <ul style="list-style-type: none"> Asset keuangan Properti investasi yang diukur pada nilai wajar (ED PSAK 1) Kewajiban berbunga jangka panjang Aset dan kewajiban pajak tangguhan Kepentingan non pengendalian |
| 2. | Laporan Laba Rugi | <ul style="list-style-type: none"> Laporan laba rugi komprehensif <ul style="list-style-type: none"> Informasi yang disajikan dalam laporan Laba Rugi komprehensif Laba rugi selama periode Pendapatan komprehensif selama periode Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan | Tidak sama dengan PSAK yang menggunakan istilah laporan laba rugi komprehensif, SAK ETAP menggunakan istilah laporan laba rugi. |
| 3. | Penyajian perubahan ekuitas | | Sama dengan PSAK, kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain. |
| 4. | Catatan Atas Laporan Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> Catatan atas laporan keuangan struktur pengungkapan kebijakan akuntansi sumber estimasi ketidakpastian modal (ED PSAK 1) pengungkapan lain | Sama dengan PSAK, kecuali pengungkapan modal. |
| 5. | Laporan Arus Kas | <ul style="list-style-type: none"> Arus kas aktivitas operasi : metode langsung dan tidak langsung Arus kas aktivitas investasi Arus kas aktivitas pendanaan Arus kas mata uang asing Arus kas bunga dan deviden, pajak penghasilan, transaksi non kas | Sama dengan PSAK kecuali : <ul style="list-style-type: none"> Arus kas aktivitas operasi : metode tidak langsung Arus kas mata uang tidak diatur |
| 6. | Laporan keuangan konsolidasi dan terpisah | <ul style="list-style-type: none"> Persyaratan penyajian lap. keu konsolidasi Entitas bertujuan khusus prosedur konsolidasi lap. keu sendiri lap. keu gabungan | Tidak diatur (Lihat Bab 12) |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 7. | Kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan | <p>PSAK 25 (Laba atau Rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan : pos luar biasa, laba atau rugi dari aktivitas normal, operasi yang tidak dilanjutkan, perubahan estimasi akuntansi - kesalahan mendasar - perubahan kebijakan akuntansi : penerapan suatu standar akuntansi keuangan, perubahan kebijakan akuntansi yang lain. | <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi • Konsistensi dan perubahan kebijakan akuntansi • Perubahan estimasi akuntansi • kesalahan SAK ETAP sudah maju satu langkah dibandingkan PSAK (tidak ada "kesalahan mendasar" dan "laba atau rugi luar biasa") |
| 8. | Instrumen keuangan dasar | <ul style="list-style-type: none"> • Ruang lingkup: aset dan kewajiban keuangan • instrumen keuangan dasar • diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, pinjaman dan pinjaman yang diberikan • impairment menggunakan incurred loss concept • derecognition • hedging dan derivatif • ruang lingkup : investasi pada efek tertentu | PSAK 50 (1998) |
| 9. | Persediaan | <ul style="list-style-type: none"> • pengukuran persediaan • biaya persediaan • biaya pembelian • biaya konversi • biaya lain lain • biaya pemberian jasa • teknik pengukuran biaya rumus biaya • nilai realisasi bersih • pengakuan sebagai beban • pengungkapan | Sama dengan PSAK |
| 10. | Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak | <ul style="list-style-type: none"> • ruang lingkup : entitas asosiasi • metode akuntansi • metode biaya • metode ekuitas • model nilai wajar (ED PSAK 15) • Ruang lingkup: entitas asosiasi dan entitas anak • metode akuntansi • entitas asosiasi : metode biaya | Metode ekuitas |
| 11. | Investasi pada perusahaan asosiasi dan entitas anak | <ul style="list-style-type: none"> • Jointly controlled operation, asset, and entity • metode akuntansi • metode konsolidasi proposional • metode ekuitas • model nilai wajar (ED PSAK 12:PBA/PBO/PBE) | Sama dengan PSAK kecuali metode akuntansi hanya menggunakan metode biaya. |

| | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| 12. | Property Investasi | Metode akuntansi - metode nilai wajar model biaya | Metode akuntansi : Model biaya |
| 13. | Aset tetap | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kompenenisasi • pengukuran menggunakan model biaya atau model revaluasi • pengukuran biaya perolehan • pengakuan pengeluaran selanjutnya • penyusutan • tidak perlu review nilai residu, metode penyusutan, dan umur manfaat setiap akhir periode pelaporan, tetapi jika ada indikasi perubahan saja | <p>Sama dengan PSAK kecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak menggunakan pendekatan kompenenisasi • revaluasi diijinkan jika dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah hal ini mengacu ke PSAK 16 (1994) • Tidak perlu review nilai residu |
| 14. | Aset tidak berwujud | <ul style="list-style-type: none"> • prinsip umum untuk pengakuan • pengakuan awal, pengukuran selanjutnya • amortisasi selama umur manfaat atau 10 tahun • penurunan nilai | Sama dengan PSAK, kecuali aset tidak berwujud yang diperoleh dari penggabungan usaha |
| 15. | Sewa | <ul style="list-style-type: none"> • mengatur perjanjian yang mengandung sewa • klasifikasi bersifat principle blased • laporan keuangan lesse dan • tidak mengatur perjanjian yang menggunakan sewa | |
| 16. | Ekuitas | <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan • akuntansi ekuitas untuk badan bukan untuk PT • akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT • reorganisasi • selisih penilaian kembali | <p>Sama dengan PSAK kecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - reorganisasi - selisih penilaian kembali |
| 17. | Pendapatan | <ul style="list-style-type: none"> • penjualan barang • penjualan jasa • kontrak konstruksi • bunga, deviden, dan royalti • lampiran kasus pengakuan pendapatan (ED PSAK 23) | Sama dengan PSAK |
| 18. | Biaya pinjaman | <ul style="list-style-type: none"> • komponen biaya pinjaman • pengakuan dan kapitalisasi biaya pinjaman | Biaya pinjaman langsung dibebankan |
| 19. | Penurunan nilai aset | <ul style="list-style-type: none"> • penurunan nilai persediaan • penurunan nilai non persediaan • penurunan nilai goodwill | <p>Sama dengan PSAK kecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset - tidak mengatur penurunan nilai goodwill - ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31 : akuntansi perbankan paragraf 16 dan 17 |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 20. | Imbalan kerja | <ul style="list-style-type: none"> • Imbalan kerja jangka pendek • imbalan pasca kerja, untuk manfaat pasti menggunakan PUC • imbalan jangka panjang lainnya • pesangon pemutusan kerja | Sama dengan PSAK kecuali untuk manfaat pasti menggunakan PUS dan jika tidak bisa, menggunakan metode yang disederhanakan |
| 21. | Pajak penghasilan | <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan deferred tax concept • pengakuan dan pengukuran pajak kini • pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan • menggunakan taxpayable concept • tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan | |
| 22. | Mata uang pelaporan | <ul style="list-style-type: none"> • mata uang pencatatan • mata uang fungsional • penentuan saldo awal • penyajian komparatif • perubahan mata uang pencatatan dan pelaporan | Sama dengan PSAK Mata Uang Pelaporan <ul style="list-style-type: none"> - Mata uang fungsional - pelaporan transaksi mata uang asing dalam mata uang fungsional (pada prinsipnya sama) |
| 23. | Peristiwa setelah akhir periode pelaporan | <ul style="list-style-type: none"> • peristiwa yang memerlukan penyesuaian • peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian | Sama dengan PSAK |
| 24. | Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa | <ul style="list-style-type: none"> • pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa • pengungkapan | Sama dengan PSAK 7 |
| 25. | Aktivitas khusus | <ul style="list-style-type: none"> • akuntansi perkoperasian • akuntansi minyak dan gas bumi • akuntansi pertambangan umum • akuntansi perusahaan efek • akuntansi reksadana • akuntansi perbankan dan asuransi | Tidak diatur |
| 26. | Ketentuan transisi | | <ul style="list-style-type: none"> • Retrospektif (jika tidak praktis) yang diterapkan secara prospective catchup (dampak ke saldo laba) • perpindahan dari dan ke SAK ETAP |
| 27. | Tanggal efektif | | Berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010 |

Tabel 2.1

Sumber : Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

Secara umum, terdapat perbedaan pokok antara SAK ETAP dan PSAK IFRS Perbedaan tersebut adalah :

- 1) SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
- 2) SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung dalam laporan arus kas
- 3) SAK ETAP menggunakan *cost model* untuk investasi ke asosiasi, dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan,
- 4) SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55, SAK ETAP hanya menggunakan *cost model* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi, PSAK IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

Contoh Laporan Keuangan antara PSAK dan SAK ETAP

Menurut PSAK :

| KOPERASI SEJAHTERA ABADI NERACA PER 31 DESEMBER 2010 | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| AKTIVA | | UTANG DAN MODAL | |
| Aktiva lancar : | | Utang lancar : | |
| Kas | Rp 60.000.000 | Utang usaha | Rp 100.000.000 |
| Piutang anggota | 444.000.000 | Utang Bunga | 5.000.000 |
| Perlng kantor | 10.000.000 | Simpanan sukarela | 50.000.000 |
| Premi asuransi | 5.000.000 | Jumlah utang lancar | Rp 155.000.000 |
| Jumlah aktiva lancar | Rp 515.000.000 | | |
| Aktiva tetap : | | Utang jangka panjang : | |
| Gedung kantor | Rp 600.000.000 | Utang Bank | Rp 290.000.000 |
| Akm.penyu.gedung | (60.000.000) | Jumlah utang | Rp 445.000.000 |
| Peralatan kantor | 100.000.000 | | |
| Akm.peraltan kantor | (20.000.000) | Modal : | |
| Jumlah aktiva tetap | Rp 620.000.000 | Simpanan pokok | Rp 400.000.000 |
| | | Simpanan wajib | 150.000.000 |
| | | Penyertaan | 50.000.000 |
| | | Cadangan | 50.000.000 |
| | | SHU | 40.000.000 |
| Total Aktiva | Rp 1.135.000.000 | Jumlah ekuitas | Rp 690.000.000 |
| | | Jumlah utang&modal | Rp 1.135.000.000 |

Tabel 2.2

Sumber : Adenk sudarwanto Akuntansi koperasi berdasarkan PSAK No. 27

| KOPERASI SEJAHTERA ABADI LABA / RUGI PERIODE 1 JANUARI S/D DESEMBER 2010 | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------------|
| I. Partisipasi anggota : | | | |
| Partisipasi bruto anggota | | | |
| 1. partisipasi jasa pinjaman | Rp | 46.950.000 | |
| 2. partisipasi jasa adm.&provisi | | <u>2.030.000</u> | |
| Jumlah partisipasi bruto | Rp | 43.348.000 | |
| 3. beban pokok (bbn bunga sipanan) | | <u>5.632.000</u> | |
| 4. Partisipasi Netto | Rp | | 43.348.000 |
| II. Pendapatan dari non anggota : | | | |
| 1. pendapatan jasa bunga | Rp | 53.397.000 | |
| 2. pendpatan adm.&provisi | | 1.792.000 | |
| 3. pendapatan denda | | <u>650.000</u> | |
| Jumlah pendapatan non anggota | Rp | 55.839.000 | |
| 4. harga pokok (bebn bunga anggota) | | <u>5.534.000</u> | |
| 5. laba netto dari non anggota | Rp | | <u>50.305.000</u> |
| Sisa hasil usaha sebelum beban Operasional | Rp | | <u>93.653.000</u> |
| III. Beban operasioanal | | | |
| 1. beban adm & umum | Rp | 15.500.000 | |
| 2. beban pemasaran | | <u>10.000.000</u> | |
| Jumlah beban operasional | Rp | | <u>25.500.000</u> |
| SHU sebelum beban perkoperasian | Rp | | <u>68.153.000</u> |
| IV. Beban perkoperasian | Rp | | <u>2.153.000</u> |
| SHU bersih sebelum p'dpatan diluar usaha | Rp | | <u>66.000.000</u> |
| V. Pendapatan dan beban diluar usaha : | | | |
| 1. Laba penjualan aktiva | Rp | 3.000.000 | |
| 2. beban bunga bank | | <u>4.000.000</u> | |
| Jumlah pendapatan beban diluar usaha | Rp | | <u>6.000.000</u> |
| SHU bersih sebelum pajak | Rp | | <u>60.000.000</u> |
| VI. PPH Badan | Rp | | <u>9.000.000</u> |
| VII. SHU bersih setelah pajak | Rp | | <u>51.000.000</u> |

Tabel 2.3

Sumber : Adenk sudarwanto Akuntansi koperasi berdasarkan PSAK No. 27

| KOPERASI SEJAHTERA ABADI LAPORAN ARUS KAS PERIODE 1 Januari s/d 31 Desember 2010 | | |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Arus kas dari aktivitas operasi : | | |
| 1. Hasil usaha bersih | Rp 50.000.000 | |
| 2. Penyesuaian | | |
| 2.1 penyesuaian gedung | Rp 6.000.000 | |
| 2.2 penyesuaian peralatan kantor | 2.000.000 | |
| 2.3 kenaikan piutang anggota | (47.500.000) | |
| 2.4 penurunan perlengkapan kantor | 2.000.000 | |
| 2.5 penurunan premi asuransi | 2.500.000 | |
| 2.6 kenaikan hutang usaha | 50.000.000 | |
| 2.7 kenaikan simpanan sukarela | 5.000.000 | |
| 2.8 penurunan utang Bank | (15.000.000) | |
| Arus kas bersih yang dihasilkan | | Rp 5.000.000 |
| II. Aktivitas investasi : | | |
| III. Aktivitas pendanaan : | | |
| SHU tahun 2009 | | Rp (40.000.000) |
| Kenaikan kas | | Rp 15.000.000 |
| IV. Saldo awal kas | | Rp 60.000.000 |
| Saldo akhir kas | | Rp 75.000.000 |
| Kenaikan kas | | Rp 15.000.000 |

Tabel 2.4

Sumber : Adenk sudarwanto Akuntansi koperasi berdasarkan PSAK No. 27

Menurut SAK ETAP

| KOPERASI X LAPORAN NERACA PER 31 DESEMBER 2011 | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| No. Urut | U R A I A N | Tahun 2011 (Rp) | Tahun 2010 (Rp) | No. Urut | U R A I A N | Tahun 2011 (Rp) | Tahun 2010 (Rp) |
| I | AKTIVA LANCAR | 8.050.058 | 4.637.595 | IV | KEWAJIBAN LANCAR | 498.942.299 | 463.159.746 |
| 1 | Kas umum | 2.799.747 | 2.799.747 | 17 | Jasa anggota | 126.995.277 | 108.627.220 |
| 2 | Bank | 5.309.248.518 | 6.597.311.258 | 18 | Dana pengurus | 62.319.783 | 53.135.755 |
| 3 | Pinjaman diberikan | 500.960.175 | 545.810.935 | 19 | Dana karyawan | 77.636.548 | 68.452.520 |
| 4 | Piutang pertokoan | 27.872.405 | 27.616.805 | 20 | Dana pendidikan | 70.544.363 | 62.785.335 |
| 5 | Piutang Unit FC | 20.005.708 | 20.988.368 | 21 | Dana sosial | 183.000 | 190.000 |
| 6 | Piutang khusus | 13.945.387 | 20.926.749 | 22 | Simpanan sukarela | 0 | 0 |
| 7 | Persediaan barang toko | 5.882.881.998 | 7.220.091.457 | 23 | Hutang usaha | 2.847.901.051 | 4.532.067.528 |
| | JUMLAH | | | 24 | Hutang bank | 3.684.522.321 | 5.288.418.104 |
| | | | | | JUMLAH | | |
| III | INVESTASI JANGKA PANJANG | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 9 | Simpanan pokok di Puskoppol | 2.926.500 | 2.926.500 | V | MODAL SENDIRI | 8.110.000 | 8.060.000 |
| 10 | Simpanan wajib di Puskoppol | 202.040 | 202.040 | 25 | Simpanan pokok | 1.528.639.600 | 1.328.490.100 |
| 11 | Simpanan sukarela di Puskoppol | 3.158.540 | 3.158.540 | 26 | Simpanan wajib | 530.000 | 530.000 |
| | JUMLAH | | | 27 | Donasi | 492.051.488 | 436.947.318 |
| | | | | 28 | Cadangan | 189.269.429 | 183.680.565 |
| III | AKTIVA TETAP | 20.480.150 | 20.480.150 | 29 | S H U | 2.218.600.517 | 1.957.707.983 |
| 12 | Gedung | 5.305.500 | 5.305.500 | | | | |
| 13 | Peralatan kantor | 2.950.045 | 2.950.045 | | | | |
| 14 | Perlengkapan | 41.434.000 | 41.434.000 | | | | |
| 15 | Mesi foto copy | 53.087.395 | 47.293.605 | | | | |
| 16 | Akumulasi penyusutan | 17.082.300 | 22.876.090 | | | | |
| | JUMLAH | 5.903.122.838 | 7.246.126.087 | | JUMLAH | 5.903.122.838 | 7.246.126.087 |

Tabel 2.5

Sumber : Koperasi X

| KOPERASI X Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2013 | |
|---|-----------------------|
| Keterangan | |
| PENDPATAN | Rp 954.994.992 |
| Bunga USP | Rp 546.820.340 |
| Penjualan barang dagangan | Rp 158.994.000 |
| Pendapatan pelayanan | Rp 69.934.000 |
| Pendapatan foto kopi | Rp 37.556.975 |
| Pendapatan loket non A | Rp 115.378.682 |
| Pendapatan usaha lain | Rp 26.310.625 |
| BEBAN | Rp 812.259.386 |
| Beban usaha | |
| Beban USP | Rp 88.861.549 |
| Harga pokok penjualan | |
| Pembelian BD SPK | Rp 119.238.831 |
| Beban pelayanan | Rp 48.995.389 |
| Beban fotokopi | Rp 33.926.500 |
| Biaya loket non A | Rp 102.966.930 |
| Biaya usahalainnya | Rp 3.054.884 |
| Biaya administrasi & umum | |
| Biaya umum | Rp 38.255.549 |
| Gaji karyaan koperasi | Rp 79.898.000 |
| Tunjangan hari raya | Rp 5.433.000 |
| Biaya astek karyawan koperasi | Rp 7.734.532 |
| BEBAN PERKOPERASIAN | |
| Biaya organsasi | Rp 203.145.830 |
| Biaya non operasoinal | Rp 80.788.392 |
| SHU BRUTO | Rp 142.735.536 |
| PENDAPATAN / BEBAN LAIN | Rp 4.515.240 |
| Pendapatan luar usaha | Rp 7.066.015 |
| Pengeluaran luar usaha | Rp 2.550.775 |
| SHU SEBELUM PAJAK | Rp 147.250.776 |
| PAJAK PENGHASILAN | Rp 18.406.347 |
| SHU SETELAH PAJAK | Rp 128.844.429 |

Tabel 2.6

Sumber : Koperasi X

| KOPERASI X | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| Laporan Arus Kas / Bank | | | |
| Per 31 Desember 2011 | | | |
| NO | URAIAN | TAHUN 2011 | TAHUN 2010 |
| I | ARUS KAS AKTIFITAS OPERASI | | |
| 1 | SHU tahun berjalan | 189.269.429 | 183.680.565 |
| | Penyesuaian dasar kas | | |
| 2 | Penyusutan aktiva tetap | 53.087.395 | 47.293.605 |
| | SHU sebelum perubahan modal kerja | 242.356.824 | 230.974.170 |
| 3 | Perubahan piutang | 2.500.462.944 | 298.772.915 |
| 4 | Perubahan persediaan barang | 6.981.362 | 6.261.907 |
| 5 | Perubahan hutang usaha | 0 | 20.000.000 |
| 6 | Perubahan dana-dana | 44.495.141 | 115.378.061 |
| 7 | Perubahan jasa anggota | 35.782.553 | 30.442.836 |
| 8 | Perubahan simpanan sukarela | 7.000 | 12.000 |
| 9 | Perubahan piutang FC | 255.600 | 137.000 |
| 10 | Perubahan hutang bank | (1.684.166.477) | -319.989.302 |
| | | 903.818.123 | 151.015.417 |
| | Arus kas dari aktifitas operasi | 1.146.174.947 | 381.989.587 |
| II | ARUS KAS AKTIFITAS INVESTASI | | |
| 1 | Perubahan penyertaan | 0 | 0 |
| 2 | Perubahan aktifa tetap | 5.793.790 | -5.503.575 |
| 3 | Perubahan Investasi SP | (1.288.062.740) | -501.982.191 |
| | Arus kas dari aktifitas investasi | (1.282.268.950) | -507.485.766 |
| III | ARUS KAS AKTIFITAS PENDANAAN | | |
| 1 | Perubahan simpanan pokok | 50.000 | 1.420.000 |
| 2 | Perubahan simpanan wajib | 200.149.500 | 114.602.452 |
| 3 | Perubahan cadangan | (55.104.170) | 106.181.071 |
| 4 | Perubahan donasi | 0 | 0 |
| 5 | Alokasi SHU tahun lalu | (5.588.864) | -170.256.337 |
| 6 | Perubahan simpanan bank | 0 | 0 |
| | | 139.506.466 | 51.947.186 |
| | Kenaikan / penurunan kas dan bank | 3.412.463 | 1.170.485 |
| | Kas dan bank awal | 7.437.342 | 6.266.857 |
| | Jumlah kas dan bank akhir periode | 10.849.805 | 7.437.342 |

Tabel 2.7

Sumber : Koperasi X

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Nama : Erma Suryanti

Tahun : 2013

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Jenderal Soedirman

Judul : " Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK- ETAP) Pada Koperasi Di eks- Karisedenan Banyumas"

Metode penelitian yang digunakan : Hasil Kesimpulan : Dari hasil analisis kualitatif penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP) dalam penyajian laporan keuangan koperasi eks- Karesidenan Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Penyajian laporan keuangan koperasi primer di eks Karesidenan Banyumas sebagian besar belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- b) Faktor faktor yang menyebabkan penyajian laporan keuangan koperasi primer di eks- Karesidenan Banyumas belum sesuai dengan SAK ETAP anatara lain :
 - Penggunaan software akuntansi
 - Kurangnya sosialisasi atau pelatihan akuntansi koperasi oleh pemerintah
 - Sumber daya manusia yang kurang kompeten dibidang akuntansi

2. Nama : Sri Mujayati

Tahun : 2008

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Judul : " Kinerja keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di KPRI Makmur Krian periode 2008 - 2012"

Metode yang digunakan : Metode kualitatif deskriptif

Hasil kesimpulan : Dari hasil penelitian bahwa kinerja keuangan yang telah dicapai oleh KPRI Makmur Krian selama tahun 2008-2012 ditinjau dari aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Dapat diketahui bahwa koperasi ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, koperasi ini mengalami kemajuan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Nama : Agus Widodo

Tahun : 2012

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

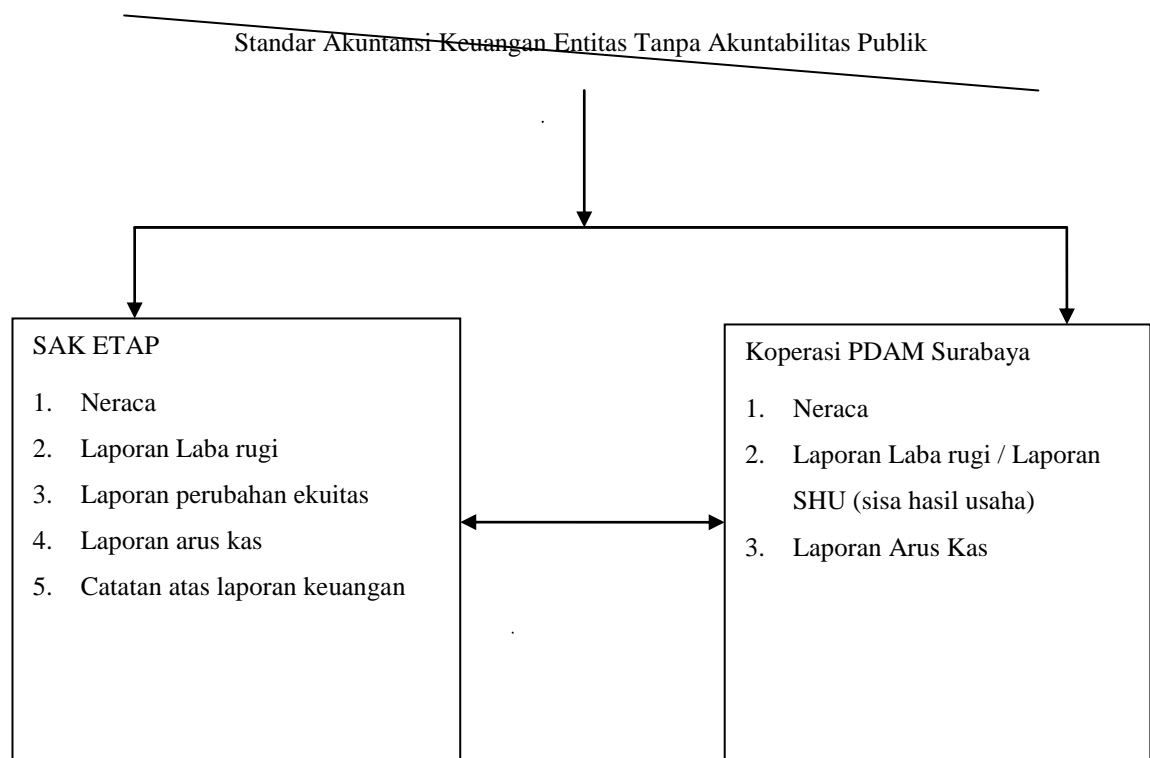
Judul : " Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK- ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan"

Metode yang digunakan : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Hasil Kesimpulan : Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwasannya UMKM ini adalah tidak memiliki laporan keuangan sesuai dengan standar SAK ETAP dan UMKM yang memiliki catatan keuangan yang baik mempunyai perkembangan yang lebih pesat dibanding UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya sama, bahkan lebih mudah dari beberapa UMKM yang lainnya. Salah satu yang mendorong kemajuan UMKM tersebut adalah kemampuan mengakses kredit dari perbankan, sehingga

masalah kesulitan permodalan dapat diatasi, bahkan omzet pada tahun 2010 mencapai lebih dari 800 juta rupiah, dengan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya mencapai lebih dari 100 juta rupiah.

C. KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 2.1 : Kerangka konseptual penelitian

Sumber : Diolah peneliti